



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Jabon Mojoanyar Nomor 188 Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61365
Telp/Fax (0321) 325470 Website : www.bpbd.mojokertokab.go.id

Mojokerto, 20 Maret 2025

Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Mojokerto
Di-
Mojokerto

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/1569/416-205/2025

No	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Rencana Kerja BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2026	Satu berkas	-

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mojokerto



Drs. Yo'ie Afrida Soesetyo Djati, S.H, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 196802071988091001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



BPBD KAB.MOJOKERTO

RENCANA KERJA TAHUN 2026



Jalan Raya Jabon No. 188 Mojoanyar

Telp : (0321)– 325470

Email : bpbdmojokertokab@gmail.com

Website : bpbd.mojokertokab.go.id

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan serta pagu dana indikatif selama satu tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa, sehingga bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Aminya robbal alamiin.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar	iii	
Tabel		
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	5
	LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
BAB V	PENUTUP	80
5.1	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan yang terakhir Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Mojokerto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto juga menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan

cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagiseluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karenamemuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasiyang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dankegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yangsaling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkandalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awaluntuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

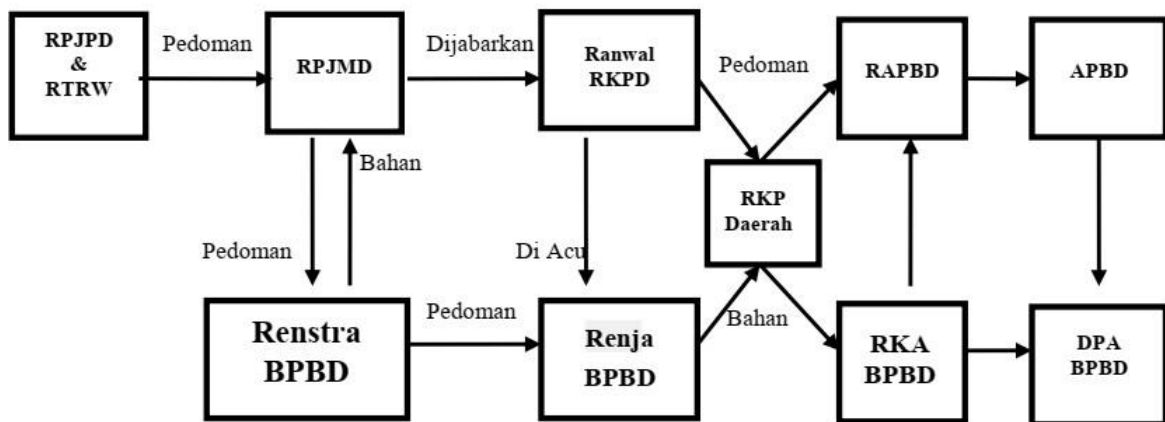
Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2026.

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokertoterkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam halprogram dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja BPBD Kabupaten Mojokertoselaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasidan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto 2012 – 2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, pemenuhan kebutuhan logistik serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam rangka meningkatkan kinerja profesional.

Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang penanggulangan bencana, sehingga para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan, serta dapat berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun- tahun sebelumnya.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat penjelasan umum dari program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2026 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2027.

Bab V Penutup

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dapat dikatakan menunjukkan apa yang telah direncanakan dipastikan mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan, namun demikian tetap menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)				Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
				7		I		II		I		II		16	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana		Indeks Kapasitas Daerah (IKD)(%)	0,83											
2		[PROGRAM] 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana(%)	30,00	2.395.115.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.955.700,00	0,00	141.471.790,00	0,00	812.427.490,00	
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%)	100,00	136.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5034900	0,00	4020450	0,00	9.055.350,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun(Orang)	30,00	32.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034.900,00	0,00	4.020.450,00	0,00	9.055.350,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	104.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana(%)	100,00	1.098.715.150,00		0,00	0,00	0,00	329528000	0,00	62730340	0,00	392.258.340,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani(Kegiatan)	1,00	29.162.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya(Unit)	2,00	139.901.000,00	0,00	2,00	2,00	2,00	133.703.500,00	0,00	5.281.288,00	2,00	138.984.788,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota(Orang)	150,00	49.957.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana(Kawasan)	2,00	93.526.300,00	0,00	2,00	2,00	2,00	79.668.400,00	0,00	4.982.728,00	2,00	84.651.128,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana(Orang)	8,00	94.949.950,00	0,00	0,00	8,00	8,00	54.184.100,00	0,00	10.428.760,00	8,00	64.612.860,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	113.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya(laporan)	12,00	399.993.950,00	3,00	3,00	3,00	3,00	61.172.000,00	0,00	42.037.564,00	3,00	103.209.564,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	93.134.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(Kawasan)	100,00	84.968.450,00	0,00		0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%)	100,00	355.975.300,00	0,00		0,00	0,00	15750000	0,00	64275000	0,00	80.025.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)	1,00	151.995.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana(Orang)	100,00	54.594.250,00	0,00		50,00	60,00	15.750.000,00	0,00	8.665.000,00	60,00	24.415.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis(Orang)	8,00	37.470.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang)	30,00	87.165.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55.610.000,00	0,00	55.610.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota(Laporan)	1,00	24.751.050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan)	4,00	803.865.575,00	0,00		0,00	0,00	320642800	0,00	10446000	0,00	331.088.800,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)(Orang)	100,00	112.079.275,00	0,00	100,00	100,00	96.522.300,00	0,00	1.360.000,00	100,00	97.882.300,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan(Kegiatan)	1,00	514.244.300,00	0,00	0,00	1,00	211.030.500,00	0,00	680.000,00	1,00	211.710.500,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	11.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	166.522.000,00	0,00	0,00	0,00	13.090.000,00	0,00	8.406.000,00	0,00	21.496.000,00
		Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap(%)	100,00		?		0		0,00			
3	[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%)	100,00	136.559.000,00	0,00	0,00	0,00	5034900	0,00	4020450	0,00	9.055.350,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun(Orang)	30,00	32.259.000,00	0,00	0,00	0,00	5.034.900,00	0,00	4.020.450,00	0,00	9.055.350,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	104.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana(%)	100,00	1.098.715.150,00	0,00	0,00	0,00	329528000	0,00	62730340	0,00	392.258.340,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani(Kegiatan)	1,00	29.162.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya(Unit)	2,00	139.901.000,00	0,00	2,00	2,00	133.703.500,00	0,00	5.281.288,00	2,00	138.984.788,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota(Orang)	150,00	49.957.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana(Kawasan)	2,00	93.526.300,00	0,00	2,00	2,00	79.668.400,00	0,00	4.982.728,00	2,00	84.651.128,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana(Orang)	8,00	94.949.950,00	0,00	0,00	8,00	54.184.100,00	0,00	10.428.760,00	8,00	64.612.860,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	113.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya(laporan)	12,00	399.993.950,00	3,00	3,00	3,00	61.172.000,00	0,00	42.037.564,00	3,00	103.209.564,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	93.134.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(Kawasan)	100,00	84.968.450,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3	[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%)	100,00	355.975.300,00	0,00	0,00	0,00	15750000	0,00	64275000	0,00	80.025.000,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)	1,00	151.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana(Orang)	100,00	54.594.250,00	0,00	50,00	60,00	15.750.000,00	0,00	8.665.000,00	60,00	24.415.000,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis(Orang)	8,00	37.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang)	30,00	87.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.610.000,00	0,00	55.610.000,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota(Laporan)	1,00	24.751.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan)	4,00	803.865.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320642800	0,00	10446000	0,00	331.088.800,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)(Orang)	100,00	112.079.275,00	0,00	100,00	100,00	96.522.300,00	0,00	1.360.000,00	100,00	97.882.300,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan(Kegiatan)	1,00	514.244.300,00	0,00	0,00	1,00	211.030.500,00	0,00	680.000,00	1,00	211.710.500,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	11.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	166.522.000,00	0,00	0,00	0,00	13.090.000,00	0,00	8.406.000,00	0,00	21.496.000,00	
			Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana(%)	70,00		?		0		0,00				
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%)	100,00	136.559.000,00	0,00	0,00	0,00	5034900	0,00	4020450	0,00	9.055.350,00	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun(Orang)	30,00	32.259.000,00	0,00	0,00	0,00	5.034.900,00	0,00	4.020.450,00	0,00	9.055.350,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	104.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana(%)	100,00	1.098.715.150,00	0,00	0,00	0,00	329528000	0,00	62730340	0,00	392.258.340,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani(Kegiatan)	1,00	29.162.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya(Unit)	2,00	139.901.000,00	0,00	2,00	2,00	133.703.500,00	0,00	5.281.288,00	2,00	138.984.788,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota(Orang)	150,00	49.957.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana(Kawasan)	2,00	93.526.300,00	0,00	2,00	2,00	79.668.400,00	0,00	4.982.728,00	2,00	84.651.128,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana(Orang)	8,00	94.949.950,00	0,00	0,00	8,00	54.184.100,00	0,00	10.428.760,00	8,00	64.612.860,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	113.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya(laporan)	12,00	399.993.950,00	3,00	3,00	3,00	61.172.000,00	0,00	42.037.564,00	3,00	103.209.564,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	93.134.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(Kawasan)	100,00	84.968.450,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3	[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%)	100,00	355.975.300,00	0,00	0,00	0,00	15750000	0,00	64275000	0,00	80.025.000,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)	1,00	151.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana(Orang)	100,00	54.594.250,00	0,00	50,00	60,00	15.750.000,00	0,00	8.665.000,00	60,00	24.415.000,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis(Orang)	8,00	37.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang)	30,00	87.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.610.000,00	0,00	55.610.000,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota(Laporan)	1,00	24.751.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan)	4,00	803.865.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320642800	0,00	10446000	0,00	331.088.800,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)(Orang)	100,00	112.079.275,00	0,00	100,00	100,00	96.522.300,00	0,00	1.360.000,00	100,00	97.882.300,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan(Kegiatan)	1,00	514.244.300,00	0,00	0,00	1,00	211.030.500,00	0,00	680.000,00	1,00	211.710.500,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)	1,00	11.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah	1,00	166.522.000,00	0,00	0,00	0,00	13.090.000,00	0,00	8.406.000,00	0,00	21.496.000,00	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Pascabencana (R3P) Kab/Kota	dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun(Dokumen)											
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel		Nilai SAKIP perangkat Daerah(nilai)	80,00										
2		[PROGRAM] 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	83,50	6.994.995.400,00	0,00		0,00	0,00	1.493.772.770,00	0,00	1.684.480.659,00	0,00	3.178.253.429,00
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah(%)	100,00	7.850.000,00	0,00		0,00	0,00	700000	0,00	800000	0,00	1.500.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	3,00	3.950.000,00	0,00		1,00	1,00	400.000,00	0,00	600.000,00	1,00	1.000.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	3,00	3.900.000,00	0,00		1,00	1,00	300.000,00	0,00	200.000,00	1,00	500.000,00
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	95,00	6.284.699.000,00	0,00		0,00	0,00	1281292965	0,00	1536654010	0,00	2.817.946.975,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	44,00	6.284.699.000,00	0,00		0,00	44,00	1.281.292.965,00	0,00	1.536.654.010,00	44,00	2.817.946.975,00
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN(%)	71,70				0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)	100,00	204.931.275,00		0,00		0,00	0,00	83639696	0,00	42495152	0,00	126.134.848,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00	6.089.375,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	2,00	34.964.400,00	0,00			2,00	0,00	0,00	0,00	32.910.000,00	0,00	32.910.000,00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	1,00	44.998.200,00	0,00			0,00		1,00	3.557.500,00	0,00	0,00	1,00	3.557.500,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1,00	27.585.400,00	0,00			0,00		1,00	19.470.800,00	0,00	1.680.000,00	1,00	21.150.800,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan(Dokumen)	12,00	6.359.400,00	3,00			3,00		3,00	1.560.000,00	0,00	582.000,00	3,00	2.142.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1,00	35.000.000,00	0,00			1,00		1,00	34.862.500,00	0,00	0,00	1,00	34.862.500,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12,00	49.934.500,00	3,00			3,00		3,00	24.188.896,00	0,00	7.323.152,00	3,00	31.512.048,00
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100,00			0,00		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(bulan)	12,00	257.527.525,00		0,00		0,00	0,00	60323278	0,00	63561487	0,00	123.884.765,00	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12,00	119.974.700,00	3,00		3,00		3,00	33.760.798,00	0,00	32.237.371,00	3,00	65.998.169,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12,00	137.552.825,00	3,00		3,00		3,00	26.562.480,00	0,00	31.324.116,00	3,00	57.886.596,00
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah(Bulan)	12,00	239.987.600,00		0,00		0,00	0,00	67816831	0,00	40970010	0,00	108.786.841,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	26,00	199.993.900,00	5,00		5,00		5,00	53.566.831,00	0,00	37.470.010,00	5,00	91.036.841,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	2,00	12.496.300,00	0,00		0,00		2,00	10.475.000,00	0,00	0,00	2,00	10.475.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	27,00	27.497.400,00	5,00		5,00		5,00	3.775.000,00	0,00	3.500.000,00	5,00	7.275.000,00
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)(%)	0,00											
2		[PROGRAM] 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap(%)	100,00	1.531.316.900,00		0,00		0,00	0,00	133.652.110,00	0,00	226.918.854,00	0,00	360.570.964,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3	[KEGIATAN] 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran(%)	100,00	1.464.982.700,00	0,00	0,00	0,00	133652110	0,00	226918854	0,00	360.570.964,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)	12,00	149.994.700,00	3,00	3,00	3,00	25.772.110,00	0,00	28.090.028,00	3,00	53.862.138,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran(Dokumen)	12,00	689.400.000,00	3,00	3,00	3,00	107.880.000,00	0,00	174.092.398,00	3,00	281.972.398,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran(Orang)	45,00	24.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661.128,00	0,00	14.661.128,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait(Unit)	6,00	600.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.300,00	0,00	10.075.300,00
3	[KEGIATAN] 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran(%)	100,00	13.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran(Dokumen)	1,00	13.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[KEGIATAN] 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran(%)	100,00	52.364.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4	[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya(Desa/Kelurahan)	2,00	52.364.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran)(%)	100,00		?			0		0,00			
3	[KEGIATAN] 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran(%)	100,00	1.464.982.700,00	0,00	0,00	0,00	133652110	0,00	226918854	0,00	360.570.964,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)	12,00	149.994.700,00	3,00	3,00	3,00	25.772.110,00	0,00	28.090.028,00	3,00	53.862.138,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran(Dokumen)	12,00	689.400.000,00	3,00	3,00	3,00	107.880.000,00	0,00	174.092.398,00	3,00	281.972.398,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran(Orang)	45,00	24.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661.128,00	0,00	14.661.128,00	
4	[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait(Unit)	6,00	600.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.300,00	0,00	10.075.300,00	
3	[KEGIATAN] 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran(%)	100,00	13.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran(Dokumen)	1,00	13.970.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran(%)	100,00	52.364.200,00		0,00		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00 0,00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya(Desa/Kelurahan)	2,00	52.364.200,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[Target Capaian Sub Kegiatan]													32.67 %	
		Triwulan 1	Triwulan 2											
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan proyeksi anggaran kas												
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	anggaran APBD yang tidak sesuai dengan usulan kebutuhan anggaran kegiatan yang telah disusun												
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]													
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]													

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tinggi, dengan hampir seluruh indikator program dan kegiatan berhasil direalisasikan sesuai target. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator utama seperti Nilai SAKIP, IKD dan Presentase WMK. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara teknis dan prosedural, BPBD telah menjalankan fungsi perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pembangunan dengan baik.

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja Program /Kegiatan,

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini terdapat 2 indikator yang menjadi target dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari 2 indikator tersebut hanya 1 indikator yang targetnya terpenuhi. Faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja tersebut adalah :

- Pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan
- Penyusunan Administrasi berjalan dengan baik

Faktor yang menyebabkan 1 indikator tidak memenuhi target yang ditetapkan adalah :

- Adanya pegawai yang pensiun
- Adanya pegawai yang meninggal dunia
- Adanya pegawai yang pindah ke opd lain
- Adanya eselon jabatan yang kosong

2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program /Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini terdapat beberapa indikator kegiatan yang menunjang terpenuhinya target kinerja yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain :

- Penyusunan dokumen perencanaan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan
- Personil yang menangani dokumen perencanaan sudah sesuai dengan kualifikasi
- Tingkat disiplin ASN sudah baik dengan pengawasan yang dilakukan atas walupun selama pandemi wabah corona absensi kembali menggunakan manual
- Rapat rutin kinerja dilakukan setiap hari senin sebagai pengontrol kinerja setiap ASN

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- Tercukupinya Anggaran Kebutuhan Kantor
3. Faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja Program /Kegiatan
- A. Program Penanggulangan Bencana
- Faktor yang menyebabkan melebihinya target kinerja tersebut adalah :
- Pelayanan telah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP dan yang diterapkan
 - Pelatihan secara internal tentang penerapan Pelayanan Prima
 - Adanya sarana pengaduan Pelayanan
 - Adanya sanksi bila pelayanan diluar Standar Pelayanan yang ditetapkan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah:
- Meningkatnya kualitas pelayanan
 - Meningkatnya nilai SAKIP
 - Tercukupinya sarana dan prasarana.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target :
- Menurunkan target capaian realisasi anggaran agar tidak terlalu tinggi sehingga bisa mencapai target yang diinginkan.
 - Melakukan rekon dengan kondisi yang mendekati real namun tetap tidak mengindahkan kaidah perencanaan yang baik dan benar.

2.1.1.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Pemantapan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pengurangan resiko bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026. Koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menekankan pada integrasi dimensi pengurangan resiko bencana baik dalam pembangunan struktural maupun non-struktural sebagai bentuk investasi yang diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi.

Pemantapan koordinasi di bidang penanganan darurat bencana diarahkan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal, disertai dengan kemampuan anggaran sejak keadaan siaga darurat sampai dengan transisi darurat. Selain itu juga diperlukan pembangunan sistem penyediaan, distribusi serta tata kelola peralatan dan logistik penanggulangan bencana yang berdasarkan pada kebutuhan dan standar minimal.

Pemantapan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanadiarahkan pada pengerahan sumberdaya bagi percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai amanat agenda pembangunan daerah.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Analisis pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET					REALISASI			PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-3)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2022 (n-3)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kerentanan	-	-	6,94	6,25	-	-	-	6,96	-		-	-	Mulai TA. 2022 Indeks Kerentanan tidak digunakan lagi sebagai indikator kinerja BPBD
2	Indeks Kapasitas	-	-	11,3	12	-	-	-	11,67	-		-	-	Mulai TA. 2022 Indeks Kapasitas tidak digunakan lagi sebagai indikator kinerja BPBD
3	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	-	-	-	0,788	0,825	0,806	0,806	-	0,76		0,788	0,8	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) mulai digunakan sebagai indikator kinerja sasaran strategis BPBD pada TA. 2022
4	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	20%	57,16%	20,00%	20,00%	-	20%		20,00%	20,00%	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) indikator kinerja sasaran strategis BPBD pada TA. 2022
5	Persentase Penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana	100%	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan

Caratan :

100%

1. Dokumen telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	(KRB) sampai dengan dinyatakan sah / legal													Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
6	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi sesuai jenis ancaman bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
7	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah / legal	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
8	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi sampai dinyatakan sah / legal	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
9	Persentase jumlah aparaturnya dan warga di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
10	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
11	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat layanan Pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

12	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat peralatan perlindungan terhadap bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
13	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
14	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
15	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
16	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada saat kejadian bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
17	Persentase layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	58,86%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018
18	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Su Urusan Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.1.1.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja yang dihadapi BPBD Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya saat ini adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya desa tangguh bencana di seluruh daerah rawan bencana.
2. Belum tersedianya sistem peringatan dini / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.
3. Belum optimalnya pentahapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.
4. Belum tersedianya rencana kontinjensi per jenis bencana yang terintegrasi dan komprehensif.
5. Pos pemadam kebakaran yang dimiliki BPBD Kabupaten Mojokerto saat ini hanya berada di 2 lokasi (Kec. Mojosari dan Kec. Mojoanyar) yang harus melayani seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas 692,15 km².

Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Mojokerto, minimal ada 10 (tujuh) pos pemadam kebakaran yang menjadi prioritas pembangunan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Mojokerto untuk dapat memenuhi waktu tanggap 15 menit dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Kebakaran Daerah kabupaten/Kota.

6. Armada pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum mencukupi (hanya memiliki 7 armada). Dari jumlah tersebut 2 unit diantaranya tidak dapat berfungsi. Jumlah armada yang dibutuhkan menyesuaikan dengan jumlah pos pemadam kebakaran / WMK yang ada. Sehingga jika seharusnya terdapat 10 pos pemadam kebakaran / WMK maka jumlah armada yang harus dimiliki sebanyak 20 unit.
7. Jumlah personil pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum sesuai standar, baik dari jumlah maupun kompetensi. Saat ini BPBD Kabupaten Mojokerto hanya memiliki 44 personil dan hanya 5 personil yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemadam Tingkat 1. Sedangkan jumlah personil pemadam kebakaran yang harus dimiliki adalah sebanyak 15 orang pada setiap pos.
8. Peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum mencukupi.

Sedangkan isu-isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Mojokerto saat ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sistem peringatan dini bencana / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.
2. Pemenuhan layanan pemadaman kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap (*response time*) 15 menit.
3. Sertifikasi keahlian/kompetensi sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran.
4. Penanganan infrastruktur rusak karena bencana yang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tapi berdampak pada masyarakat Kabupaten Mojokerto.
5. Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

2.1.1.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BPBD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran
2026
Kabupaten Mojokerto

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE					RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET	ANGGARAN(Rp)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.767.265.345	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.047.265.345
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.767.265.345	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.047.265.345
1	05	0	0	4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			10.767.265.345	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			11.047.265.345
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		7.349.199.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		7.349.199.000
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7.500.000
					Rincian:				Rincian:			
					Cetak/Penggandaan			1.000.000	Cetak/Penggandaan			1.000.000
					SPPD			6.500.000	SPPD			6.500.000
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	7.500.000
					Rincian:				Rincian:			
					Cetak/Penggandaan			1.000.000	Cetak/Penggandaan			1.000.000

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

					SPPD		6.500.000	SPPD		6.500.000
1	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	6.235.199.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	6.235.199.000
1	0	0	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang
					Rincian :			Rincian :		
					Belanja Gaji Pokok PNS		2.242.180.000	Belanja Gaji Pokok PNS		2.242.180.000
					Belanja gaji pokok PPPK		224.252.000	Belanja gaji pokok PPPK		224.252.000
					Belanja Tunjangan Keluarga PNS		261.291.000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		261.291.000
					Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		31.396.000	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		31.396.000
					Belanja Tunjangan Jabatan PNS		94.422.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		94.422.000
					Belanja Tunjangan Fungsional PNS		81.565.000	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		81.565.000
					Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		75.117.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		75.117.000
					Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		12.950.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		12.950.000
					Belanja Tunjangan Beras PNS		143.914.000	Belanja Tunjangan Beras PNS		143.914.000
					Belanja Tunjangan Beras PPPK		20.278.000	Belanja Tunjangan Beras PPPK		20.278.000
					Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		8.790.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		8.790.000
					Tambahan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		1.500.000	Tambahan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		1.500.000
					Belanja Pembulatan Gaji PNS		226.000	Belanja Pembulatan Gaji PNS		226.000
					Belanja Pembulatan Gaji PPPK		50.000	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		50.000
					Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		5.500.000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		5.500.000
					Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		539.000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		539.000
					Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		16.501.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		16.501.000
					Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		1.615.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		1.615.000
					Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		11.459.000	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		11.459.000
					Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		1.122.000	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		1.122.000
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Catatan :		2.190.700.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		2.190.700.000

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1	0	0	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor			1.800	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor			1.800
					Belanja Natura dan Pakan- Natura			1.230.200	Belanja Natura dan Pakan- Natura			1.230.200
					Belanja Makanan dan Minuman rapat			18.960.000	Belanja Makanan dan Minuman rapat			18.960.000
					Belanja Makanan dan Minuman jamuan tamu			17.988.000	Belanja Makanan dan Minuman jamuan tamu			17.988.000
					belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan			4.800.000	belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan			4.800.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000
1	0	0	2.06	000	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak			27.290.000	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak			27.290.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			3.030.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			3.030.000
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000
1	0	0	2.07	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor			54.400	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor			54.400
					Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan cetak			1.172.400	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan cetak			1.172.400
					Belanja Langganan jurnal/Surat Kabar/Majalah			5.773.200	Belanja Langganan jurnal/Surat Kabar/Majalah			5.773.200
1	0	0	2.08	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		35.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		35.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			6.516.900	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			6.516.900
					Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			15.228.000	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			15.228.000

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			10.565.100	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			10.565.100
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1.010.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1.010.000
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000
1	0	0	2.10	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	84.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	84.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat tulis kantor			1.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat tulis kantor			1.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			44.579.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			44.579.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			37.400.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			37.400.000
1	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		260.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		260.000.000
1	0	0	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat tulis kantor			25.300	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat tulis kantor			25.300
					Belanja Tagihan Telepon			39.289.700	Belanja Tagihan Telepon			39.289.700
					Belanja Tagihan Listrik			80.685.000	Belanja Tagihan Listrik			80.685.000
1	0	0	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat tulis Kantor			9.350	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat tulis Kantor			9.350
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			4.126.850	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			4.126.850
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			748.800	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			748.800
					Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			1.589.000	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			1.589.000

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		8.000.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		8.000.000
						Belanja Jasa Tenaga Administrasi		75.240.000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		75.240.000
						Belanja jasa Tenaga Kebersihan		25.080.000	Belanja jasa Tenaga Kebersihan		25.080.000
						Belanja Jasa iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		10.686.000	Belanja Jasa iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		10.686.000
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		14.520.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		14.520.000
1	051	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		489.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.500.000
1	051	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200.000.000
					Rincian :				Rincian :		
						Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		63.627.100	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		63.627.100
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.100	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.100
						Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan		36.546.800	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan		36.546.800
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		14.520.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		14.520.000
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		78.000.000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		78.000.000
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		7.300.000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		7.300.000
1	051	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	262.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	262.000.000
					Rincian :				Rincian :		
						Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		7.831.600	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		7.831.600

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis Kantor			22.884	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis Kantor			22.884
						Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor			15.160.800	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor			15.160.800
						Belanja Obat-Obatan-Obat Obatan Lainnya			472.500	Belanja Obat-Obatan-Obat Obatan Lainnya			472.500
						Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			8.976.800	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			8.976.800
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000
						Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			227.855.416	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			227.855.416
1	05	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana parasarana gedung kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 unit	27.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana parasarana gedung kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 unit	27.500.000
						Rincian :				Rincian :			
						Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor			2.600	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor			2.600
						Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer			317.400	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer			317.400
						Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa			3.100.000	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa			3.100.000
						Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			9.760.000	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			9.760.000
						Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer			9.490.000	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer			9.490.000
						Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			4.830.000	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			4.830.000
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap	100,00 %	2.097.466.345	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap	100,00 %	2.177.466.345
							2. Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana	50,00 %			2. Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana	50,00 %	
							3. Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana	70,00 %			3. Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana	70,00 %	
1	05	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	100%	175.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	100%	175.000.000
1	05	03	2.01	0007		Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan	30 Orang	70.000.000	Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan	30 Orang	70.000.000

Catatan :
1. Dokumen ini telah diundikan secara elektronik dan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. CC-112 No. 11 Tahun 2008 Pada ayat 11. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

					(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		50.600		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		50.600	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		449.400		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		449.400	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		-		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		-	
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		25.000.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		25.000.000	
					Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		-		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		-	
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		-		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		-	
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.020.000		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.020.000	
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.680.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.680.000	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		40.800.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		40.800.000	
1	053	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	105.000.000		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	105.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.500.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.500.000	
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.420.000		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.420.000	
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.680.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.680.000	
					Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik		96.000.000		Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik		96.000.000	
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1.400.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1.400.000	
1	053	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang	100%	865.720.000		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang	100%	945.720.000

						Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana				Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana			
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 kegiatan	35.720.000		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 kegiatan	35.720.000
					Rincian :					Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.100			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.100
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		385.200			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			385.200
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.100.000			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.100.000
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		12.100.000			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			12.100.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.020.000			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa		13.113.700			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			13.113.700
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 unit	140.000.000		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 unit	140.000.000
					Rincian :					Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.500			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			8.500
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		23.201.500			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			23.201.500
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga		-			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga			-
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.210.000			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1.210.000
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.680.000			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000
					Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi- Alat Deteksi Lainnya		10.000.000			Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi- Alat Deteksi Lainnya			10.000.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		8.700.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			8.700.000

					Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya			95.200.000	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya			95.200.000
1	053	2.02	0018		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	150 orang	50.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	150 orang	50.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			42.300	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			42.300
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.733.400	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.733.400
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.000.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.000.000
					Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			19.425.000	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			19.425.000
					Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan			21.000.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan			21.000.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000
					Belanja Sewa Audio Visual			1.779.300	Belanja Sewa Audio Visual			1.779.300
1	053	2.02	0020		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 kawasan	100.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 kawasan	100.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.465.200	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.465.200
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			317.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			317.000
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			770.400	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			770.400
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			12.600.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			12.600.000
					Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			21.000.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			21.000.000

						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		19.900.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		19.900.000	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		4.040.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		4.040.000	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola barang/jasa		3.360.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola barang/jasa		3.360.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12.947.400	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12.947.400	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		23.600.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		23.600.000	
1	053	2.02	0021		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	8 orang	110.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	8 orang	110.000.000
					Rincian :				Rincian :			
						Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		-	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		-	
						Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		36.590.750	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		36.590.750	
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat tulis kantor		54.250	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat tulis kantor		54.250	
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		4.200.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		4.200.000	
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga		7.485.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga		7.485.000	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.420.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.420.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		14.250.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		14.250.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		45.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		45.000.000	
1	053	2.02	0022		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	100.000.000
					Rincian :				Rincian :			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		38.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		38.000	

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			642.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			642.000
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.800.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.800.000
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			2.500.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			2.500.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.000.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.000.000
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			-	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			-
						Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			80.000.000	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			80.000.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000
1	0	0	2.02	002	6	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	200.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	280.000.000
						Rincian :				Rincian :			
						Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			34.687.500	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			34.687.500
						Belanja Bahan-Bahan Baku			-	Belanja Bahan-Bahan Baku			-
						Belanja Bahan-Bahan Lainnya			-	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			-
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor			212.500	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor			212.500
						Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			162.000.000	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			162.000.000
						Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			80.000.000
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.420.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.420.000
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			680.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			680.000
1	0	0	2.02	002	7	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah	1 dokumen		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah	1 dokumen	-

						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.420.000		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.420.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.142.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.142.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		23.100.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		23.100.000	
1	0	0	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	402.500.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	402.500.000
1	0	0	02.0	000		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	157.500.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	157.500.000
						Rincian :				Rincian :			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor		10.000		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor		10.000	
						Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		144.600.000		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		144.600.000	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.210.000		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.210.000	
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11.000.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11.000.000	
1	0	0	02.0	000		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	70.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	70.000.000
						Rincian :				Rincian :			
						Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		27.418.500		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		27.418.500	
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor		11.500		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor		11.500	
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.020.000		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.020.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.350.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.350.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		33.200.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		33.200.000	
1	0	0	02.0	000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	8 orang	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	8 orang	50.000.000

					Rincian :				Rincian :				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor			811.800	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor				811.800
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			75.600	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				75.600
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.797.600	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.797.600
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.000.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				10.000.000
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			13.250.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				13.250.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1.010.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				1.010.000
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			680.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680.000
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3.175.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3.175.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			19.200.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				19.200.000
1	053	02.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 orang	100.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 orang	100.000.000		
					Rincian :				Rincian :				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat tulis kantor			15.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat tulis kantor				15.000
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor			2.223.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor				2.223.000
					Belanja Natura dan Pakan- Natura			61.610.000	Belanja Natura dan Pakan- Natura				61.610.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			4.040.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				4.040.000
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			680.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680.000
					Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan rumah tangga-Alat kantor-Alat Kantor lainnya			8.000.000	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan rumah tangga-Alat kantor-Alat Kantor lainnya				8.000.000
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			21.732.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				21.732.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.700.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.700.000
1	053	02.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	25.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	25.000.000		

					Rincian :					Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor			48.500		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor			48.500
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			449.400		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			449.400
					Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			18.802.100		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			18.802.100
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			700.000		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			700.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.000.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.000.000
1	0	0	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 kegiatan	654.246.345		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 kegiatan	654.246.345
1	0	0	2.04	000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aparatur BPBDKabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 orang	70.000.000		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aparatur BPBDKabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 orang	70.000.000
					Rincian :					Rincian :			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor			110.200		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis Kantor			110.200
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1.010.000		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1.010.000
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			400.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			400.000
					Belanja Modal Personal Computer			66.799.800		Belanja Modal Personal Computer			66.799.800
1	0	0	2.04	000	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBDKabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 orang	140.000.000		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBDKabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 orang	140.000.000
					Rincian :					Rincian :			

Catatan : Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			2.688.500	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			2.688.500
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			300.000	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			300.000
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.570.500	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.570.500
						Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Computer			-	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Computer			-
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas			65.711.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas			65.711.000
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moederator, Pembawa Acara, dan Panitia			12.100.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moederator, Pembawa Acara, dan Panitia			12.100.000
						Belanja Honorarium penanggungjawaban Pengelola Keuangan			5.640.000	Belanja Honorarium penanggungjawaban Pengelola Keuangan			5.640.000
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			3.710.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			3.710.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			10.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			10.000.000
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			38.280.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			38.280.000
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 kegiatan	250.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 kegiatan	250.000.000	
					Rincian :					Rincian :			
						Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi			154.198.250	Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi			154.198.250
						Belanja Bahan-Bahan Baku			22.688.200	Belanja Bahan-Bahan Baku			22.688.200
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			550	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			550
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			5.640.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			5.640.000
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.855.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.855.000
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa			34.318.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			34.318.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			31.300.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			31.300.000

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1	053	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	50.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	50.000.000
				Rincian :				Rincian :			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			43.300	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			43.300
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.200.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.200.000
				Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			2.819.500	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			2.819.500
				Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			10.000.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			10.000.000
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			20.800.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			20.800.000
				Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			4.000.000	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			4.000.000
				Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000
				Belanja Sewa Audio Visual			7.117.200	Belanja Sewa Audio Visual			7.117.200
1	053	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	144.246.345	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	144.246.345
				Rincian :				Rincian :			
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			24.462.500	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			24.462.500
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			2.425.945	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			2.425.945
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			2.472.300	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			2.472.300
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			600.800	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			600.800
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos			662.400	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos			662.400
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer			5.031.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer			5.031.000

					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga			1.796.400	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga			1.796.400
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.000.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.000.000
					Belanja Jasa Tenaga Ahli			79.200.000	Belanja Jasa Tenaga Ahli			79.200.000
					Belanja Honorarium penanggungjawaban Pengelola Keuangan			5.640.000	Belanja Honorarium penanggungjawaban Pengelola Keuangan			5.640.000
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.855.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.855.000
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.100.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.100.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			-
1	054				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	100,00%	1.320.600.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	100,00%	1.520.600.000
1	054	2.01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	1.200.600.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	1.400.600.000
1	054	2.01	0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	150.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	150.000.000
					Rincian :				Rincian :			
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			93.977.100	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			93.977.100
					Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan			5.217.600	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan			5.217.600
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			5.300	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			5.300
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			14.520.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			14.520.000
					Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor-Penumpang			36.280.000	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor-Penumpang			36.280.000

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1	054	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 laporan	650.600.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 laporan	650.600.000
				Rincian :				Rincian :			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			50.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			50.000
				Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			-	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			-
				Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			535.680.000	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			535.680.000
				Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			19.320.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			19.320.000
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa			24.050.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			24.050.000
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			71.500.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			71.500.000
1	054	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	45 orang	50.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	45 orang	50.000.000
				Rincian :				Rincian :			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			24.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			24.000
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			16.656.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			16.656.000
				Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			18.600.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			18.600.000
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			12.700.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			12.700.000
				Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			2.020.000
1	054	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 unit	350.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 unit	350.000.000
				Rincian :				Rincian :			

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			870.500	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			870.500
						Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			150.000.000	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			150.000.000
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1.410.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			1.410.000
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			1.680.000
						Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi			5.737.500	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi			5.737.500
						Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran			34.552.000	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran			34.552.000
						Belanja Modal Baju Pengaman			155.750.000	Belanja Modal Baju Pengaman			155.750.000
						Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			200.000.000
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa			-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			-
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			-
1	0	0	2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	-	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	-
1	0	0	02.0	000		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	-	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	-
						Rincian :				Rincian :			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			-
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			-
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			-
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			-	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			-
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			-	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			-
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			-
1	0	0	2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	120.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	120.000.000

						dalam Pencegahan Kebakaran				dalam Pencegahan Kebakaran				
1	0	0	2.04	000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2	desa/kelurahan	120.000.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2	desa/kelurahan	120.000.000
					Rincian :					Rincian :				
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				101.200	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				101.200
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.540.800	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.540.800
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				32.970.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				32.970.000
					Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan				15.000.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan				15.000.000
					Belanja Pakaian Olahraga				17.988.000	Belanja Pakaian Olahraga				17.988.000
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				16.200.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				16.200.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				4.040.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				4.040.000
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				3.360.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				3.360.000
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa				7.600.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				7.600.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				21.200.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				21.200.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana	65%				Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana	65%		
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Mojokerto	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap	100%		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Mojokerto	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap	100%		
			Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	100%				Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	100%		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.1.1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 5 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan jurnalis. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat, dunia usaha, akademisi, jurnalis, serta pokok pikiran DPRD Kabupaten Mojoekrto yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2026 :

Tabel 2.5
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
TA. 2026 Kabupaten Mojokerto

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Program/Ke g.	Lokas i	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catata n
1	2	3	4	5	6
1	Program : Program Penanggulangan Bencana Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dusun Terusan Desa Terusan Kecamatan Gedeg	Terpenuhiny a sarana parasarana kesiapsiagaan n terhadap bencana	1 unit	Pengadaan Mesin Diesel (Pompa Air) untuk mengatasi permasalahan banjir rutin yang terjadi setiap tahun di RW 05 Dusun Terusan Desa Terusan Kecamatan Gedeg Rp. 80.000.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) yang telah menjadi kesepakatan dalam *World Conference for Disaster Risk Reduction* di Sendai pada tahun 2015. Prioritas dalam kerangka kerja ini adalah :

1. Pemahaman resiko dasar bencana.
2. Penguatan tata kelola resiko bencana dalam pengelolaan resiko bencana.
3. Investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk **“Membangun Kembali Lebih Baik”** dalam masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan Desa hingga Pemerintah Daerah dan Pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pasca bencana.

Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto juga harus menyesuaikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari reaktif menjadi proaktif, dan dari penanganan darurat menjadi pencegahan, serta senantiasa mendukung peningkatan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi di wilayah Kabupaten Mojokerto melalui upaya- upaya :

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana.
2. Menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat.
4. Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebarluasan peringatan dini

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

bencana.

6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu adalah 2021 – 2026 adalah :

1. **Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.**

Indikator tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto adalah :

1. **Indeks Resiko Bencana** dengan target kinerja pada TA. 2026 sebesar **102,6**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto adalah :

1. **Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Bahaya Kebakaran**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. **Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).**

Dengan target kinerja pada TA. 2026 sebesar 20%.

2. **Indeks Kapasitas Daerah (IKD).**

Dengan target kinerja pada TA. 2026 sebesar 0,60.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

NO	NO.REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
7	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
10	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
11	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
12	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
13	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
17	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
18	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material
19	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
21	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
22	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
26	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
28	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
35	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
36	01.05.03	Program Penanggulangan Bencana
37	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
38	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
39	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
40	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

41	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
42	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota
43	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi
44	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
45	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
46	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
47	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota
48	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
49	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
50	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
51	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
52	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
53	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
54	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
55	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
56	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
57	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
58	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
59	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit
60	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
61	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
62	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
63	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
64	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
65	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
66	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
67	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
68	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
69	1.05.03.2.04.0009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
70	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
71	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
72	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
73	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
74	01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
75	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
76	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

77	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
78	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
79	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
80	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
81	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
82	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
83	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran
84	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
85	1.05.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
86	1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
87	1.05.04.2.01.0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
88	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
89	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
90	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
91	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
92	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
93	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
94	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
95	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
96	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
97	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
98	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
99	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
100	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
101	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
102	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel 3.1
(Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2027
Kabupaten Mojokerto

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	8	9	10	11	15	16
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			11.047.265.345,00				26.903.523.290,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.047.265.345,00				26.903.523.290,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.047.265.345,00				26.903.523.290,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.349.199.000,00			-	13.365.135.790,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00			-	44.500.000,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22.000.000,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22.500.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.235.199.000,00			-	7.604.485.790,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	6.235.199.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7.604.485.790,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.000.000,00			-	220.000.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		165.000.000,00
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55.000.000,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

					(per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)				
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	140.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			495.000.000,00
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 Orang	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			165.000.000,00
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			385.000.000,00
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	110.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			129.618.500,00
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	280.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		630.498.000,00
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	130.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		330.000.000,00	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	402.500.000,00				-	689.271.000,00
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	157.500.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		294.690.000,00	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	70.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		95.755.000,00	
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota								
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	8 Orang	50.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55.000.000,00	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	100.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		216.326.000,00	
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana								
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		27.500.000,00	
1	05	03	2.04		Catatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.		654.246.345,00					-	770.000.000,00
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".								

						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		110.000.000,00	
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota								
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	140.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			165.000.000,00	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	250.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			275.000.000,00	
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota								
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00	
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota								
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen	144.246.345,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	1.520.600.000,00			-	9.339.000.000,00	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.400.600.000,00			-	7.490.560.000,00	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			550.000.000,00	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
2. UJI ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	0 Laporan	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55.000.000,00
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	0 Unit	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.512.940.000,00
						J U M L A H	11.047.265.345,00				26.903.523.290,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mojokerto

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			11.047.265.345,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.047.265.345,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.047.265.345,00		
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.349.199.000,00		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.235.199.000,00		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	6.235.199.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.000.000,00		
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	249.500.000,00		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	84.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	0,00		
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	260.000.000,00		
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
					Catatan : 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

2. UU/PP/KA/LL Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	489.500.000,00		
1	05	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	200.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	262.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	27.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	2.177.466.345,00		
1	05	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	175.000.000,00		
1	05	03	2.01	0007		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	30 Orang	70.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.01	0008		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	945.720.000,00		
1	05	03	2.02	0013		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
						Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	35.720.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.02	0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	140.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.02	0018		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	157.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	70.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						
							Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	8 Orang	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
							-	-	654.246.345,00		
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	140.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	250.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Catatan :							<p>1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.</p> <p>2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"</p>				

	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen	144.246.345,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	1.520.600.000,00		
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.400.600.000,00		
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	650.600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	32 Orang	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	550.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	0,00		
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
						Catatan : 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".					

1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	120.000.000,00		
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	120.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana					
						Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	0 Dokumen	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	0,00		
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia					
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0 Laporan	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	0 Laporan	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	0 Unit	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
J U M L A H								11.047.265.345,00		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 memuat visi, misi, arah kebijakan serta indikator rencana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto.
2. Program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto.
3. Target capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerjanya dapat dilakukan perubahan seperlunya, menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mojokerto



Drs. Yo'ie Afrida Soesetyo Djati, S.H, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 196802071988091001